

ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH *TAX AMNESTY*

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

Muhammad Ikhsan¹, Herawati²

¹Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

²Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

E-mail: ikhsan.muhammad28020000@gmail.com dan hera_devopi@yahoo.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah terjadi perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah diadakannya kebijakan pemerintah yang disebut dengan *tax amnesty*. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan Sampel pada penelitian menggunakan *purposive sampling* sehingga didapati 27 perusahaan manufaktur yang mengikuti *tax amnesty*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sebelum dan setelah *tax amnesty*. Variabel penelitian pada penelitian ini adalah *current ratio*, *debt to equity ratio*, *total asset turnover*, dan *return on asset*. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terjadi perbedaan antara *total asset turnover* sebelum dan setelah *tax amnesty* pada perusahaan manufaktur sebelum dan setelah *tax amnesty*. Sedangkan untuk variabel lainnya yakni *current ratio*, *debt to equity ratio*, dan *return on asset* ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah *tax amnesty*.

Kata kunci: *Tax amnesty*, *current ratio*, *debt to equity ratio*, *total asset turnover*, *return on asset*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 *tax amnesty* merupakan pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan syarat mengungkapkan aset lalu membayar uang tebusan yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) yang dikeluarkan presiden [1]. Pada awal tahun 2022, pemerintah mengadakan *tax amnesty* dengan nama “Program Pengungkapan Sukarela”. *Tax amnesty* bisa mendorong meningkatkan kinerja keuangan, karena dengan mengikuti *tax amnesty* maka perusahaan tersebut akan dianggap investor sebagai perusahaan yang transparan sehingga akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Selain itu, dengan mengikuti *tax amnesty* perusahaan bisa meminimalisir beban pajak sehingga bisa mengoptimalkan laba, kemudian memungkinkan perusahaan melakukan ekspansi. Dengan berkurangnya beban pajak, maka

perusahaan bisa memperoleh laba yang optimal. Dengan demikian, *tax amnesty* bisa dikatakan sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan berbasis kinerja keuangan. [2]

Perusahaan sub sektor manufaktur adalah salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Berdasarkan data kemenkeu per April 2022, sub sektor manufaktur tercatat berkontribusi sekitar 30,2 persen dari jumlah pajak yang didapatkan, kemudian industri manufaktur mengalami pertumbuhan kumulatif mencapai 50,60 persen (yoy). Akan tetapi, walaupun sektor manufaktur adalah penyumbang pajak terbesar, namun pada praktik *tax amnesty* tahun 2016-2017 sub sektor manufaktur bisa dikatakan belum cukup berhasil. Karena masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami penurunan kinerja keuangan, walaupun perusahaan tersebut telah mengikuti *tax amnesty* [3]

Kinerja keuangan yaitu suatu gambaran mengenai performa perusahaan yang berupa analisa, lalu diimplementasikan perusahaan untuk menilai sejauhmana performa perusahaan pada periode tertentu [4]. Kinerja keuangan suatu perusahaan memberikan gambaran tentang sehat atau tidaknya sebuah perusahaan. Jika perusahaan mampu mengoptimalkan sisi *financial* dan manajemennya, maka perusahaan tersebut dikategorikan sebagai perusahaan yang baik. Perusahaan yang baik akan selalu mengawasi kinerja keuangan perusahaannya. Karena dengan kinerja keuangan yang mapan, maka dapat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut [5]

Penilaian kinerja diimplementasikan perusahaan untuk meninjau kembali kegiatan operasionalnya sehingga perusahaan memiliki kemampuan bersaing dengan perusahaan lain. Dalam menilai kinerja keuangan terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat dijadikan tolak ukur, seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktifitas, dan profitabilitas [6].

Current ratio adalah bagian dari rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menilai prestasi perusahaan dalam mengukur performa perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi perbandingan aset lancar terhadap hutang jangka pendek, maka semakin tinggi performa perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya [7]

Debt to equity ratio mempunyai fungsi sebagai pembanding antara hutang dan ekuitas pada pendanaan perusahaan [7]. Pada rasio ini dapat menggambarkan performa modal perusahaan dalam menutupi kewajiban perusahaan. Semakin tinggi *debt to equity ratio*, maka akan semakin tinggi tanggungan permodalan perusahaan pada pihak luar perusahaan, sehingga akan berefek pada beban perusahaan yang juga akan meningkat[4].

Total asset turnover merupakan rasio untuk menilai tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Jika efisiensi penjualan

semakin meningkat maka perusahaan akan memperoleh laba dalam skala yang besar[6].

Return on asset adalah rasio keuangan yang dipakai untuk menilai performa aset perusahaan dalam menciptakan laba dengan menggunakan total aktiva perusahaan. Semakin tinggi *return on asset* perusahaan, maka akan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan [6]

Untuk menghasilkan kinerja yang optimal, maka perusahaan harus bisa mengelola aset, ekuitas, dan liabilitas. Perusahaan biasanya mengklaim pembayaran pajak sebagai “beban” sehingga akan berusaha untuk meminimalisir beban tersebut guna memaksimalkan laba. Di sisi lain, pajak merupakan sumbangan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa. Kemudian uang hasil pajak tersebut akan diputar kembali untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Hal ini tentu bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang berkeinginan ingin memperoleh laba semaksimal mungkin. Berdasarkan paradigma tersebut maka perusahaan dapat memaksimalkan program pemerintah yang sedang berlangsung saat ini, yaitu *tax amnesty*.

Teori sinyal merupakan teori yang mengemukakan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen perusahaan demi memenuhi kebutuhan *stakeholder*[6]. Pada penelitian ini, yang dijadikan sinyal adalah partisipasi perusahaan dalam mengikuti *tax amnesty*. Partisipasi perusahaan dalam *tax amnesty* akan memberikan sinyal bahwa perusahaan adalah perusahaan yang transparan dan taat kepada Undang-undang sehingga akan mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu masalah bahwa apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah *tax amnesty* yang diukur dengan menggunakan variabel *current ratio*, *debt to equity ratio*, *total asset turnover*, dan *return on asset*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat

perbedaan kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah *tax amnesty*.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yakni sebanyak 193 perusahaan. Teknik pengambilan

sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, sehingga diperoleh 27 perusahaan yang memenuhi kriteria. Dalam rangka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini maka metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah uji *wilcoxon* dengan alat bantu SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji *Wilcoxon*

Variabel Penelitian	Sig	Hasil
<i>Current ratio</i> setelah - sebelum <i>tax amnesty</i> (X1)	0,38	H ₁ Ditolak
<i>Debt quity ratio</i> sebelum - setelah <i>tax amnesty</i> (X2)	0,24	H ₂ Ditolak
<i>Total asset turnover</i> sebelum - setelah <i>tax amnesty</i> (X3)	0,00	H ₃ Diterima
<i>Return on asset</i> sebelum - setelah <i>tax amnesty</i> (X4)	0,15	H ₄ Ditolak

Berdasarkan hasil uji beda variabel *current ratio* sebelum dan setelah *tax amnesty*, didapatkan hasil bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara *current ratio* sebelum dan setelah *tax amnesty* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Karena signifikansi diperoleh $0,38 > \alpha 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa H₁ ditolak. Ini artinya perusahaan tidak maksimal meningkatkan investasi berupa aset lancar dari aliran dana repatriasi aset, lalu perusahaan juga belum mampu menekan hutang lancarnya.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, ditemukan bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara *debt to equity ratio* sebelum dan setelah *tax amnesty* karena diperoleh nilai signifikan $0,24 > \alpha (0,05)$. Jadi, dapat dikatakan bahwa H₂ ditolak. *Debt to equity ratio* yaitu rasio yang bisa memberikan gambaran mengenai performa ekuitas perusahaan dalam membayar hutang kepada pihak luar. Seharusnya dengan adanya *tax amnesty*, perusahaan dapat memanfaatkan dana repatriasi yang diberikan pemerintah sehingga bisa mengurangi tingkat

hutang dalam pengembangan perusahaan. Namun, Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bahwa *debt to equity ratio* belum mampu menutupi hutang kepada pihak luar dengan performa perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas pada perusahaan manufaktur. Ini artinya perusahaan belum bisa memaksimalkan tambahan dana repatriasi untuk mengurangi komposisi hutang.

Berdasarkan hasil uji *wilcoxon*, ditemukan bahwa terjadi perbedaan antara *total asset turnover* sebelum dan setelah *tax amnesty* pada perusahaan manufaktur. Karena diperoleh signifikansi $0,00 < \alpha (0,05)$. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa H₃ diterima, karena terjadi perbedaan yang signifikan antara *total asset turnover* sebelum dan setelah *tax amnesty*. Ini artinya terjadi perbedaan antara *total asset turnover* sebelum dan setelah *tax amnesty* maka perusahaan dianggap telah maksimal mengelola perputaran aset dalam menghasilkan penjualan perusahaan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya *tax amnesty*, perusahaan dapat meningkatkan nilai aset. Karena Pada *tax amnesty*

terdapat pengampunan atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Oleh sebab itu, perusahaan mempunyai peluang untuk meningkatkan nilai aset.

Berdasarkan hasil uji *wilcoxon* diketahui bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara *return on asset* sebelum dan setelah *tax amnesty* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Karena nilai signifikansi $0,15 > \alpha (0,05)$ Sehingga, dapat dikatakan bahwa H_4 ditolak. Ini artinya tidak terdapat perbedaan antara *return on asset* sebelum dan setelah *tax amnesty*, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan belum mampu mengelola aset secara maksimal dalam menghasilkan laba. Padahal pada program *tax amnesty*, pajak perusahaan yang dikenakan denda akan dimaafkan, dan itu bisa mendorong perusahaan untuk meningkatkan laba. Kemudian pada *tax amnesty* tidak terdapat potongan denda pajak, sehingga perusahaan seharusnya bisa memutar kembali laba tersebut untuk investasi pada perusahaan sehingga kinerja keuangan juga meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tidak terdapat perbedaan *current ratio* sebelum dan setelah *tax amnesty* dengan demikian hipotesis pertama (H_1) ditolak.
2. Tidak terdapat perbedaan *debt to equity ratio* sebelum dan setelah *tax amnesty* dengan demikian hipotesis kedua (H_2) ditolak
3. Terdapat perbedaan *total asset turnover* sebelum dan setelah *tax amnesty* dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) pada penelitian ini diterima.
4. Tidak terdapat perbedaan *return on asset* sebelum dan setelah *tax amnesty* dengan demikian hipotesis keempat (H_4) ditolak.

Keterbatasan penelitian dan saran yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memakai waktu amatan yang lebih panjang agar dapat melihat kecenderungan

yang terjadi dalam jangka panjang dan mampu menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang.

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel rasio keuangan yang lebih banyak sehingga bisa mencerminkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya perbedaan sebelum dan setelah *tax amnesty*.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek pengamatan seperti pada perusahaan jasa, keuangan dan, pertambangan,

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016
- [2] Koapaha, H. P., & Pantow, R. A. (2021). Tingkat Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tax Amnesty Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei. *Klabat Accounting Review*, 2(1), 66. <https://doi.org/10.31154/kar.v2i1.565.66-79>
- [3] <https://www.kemenkeu.go.id>
- [4] Fahmi, I. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.masyar. *Jurnal Mediasi*, 2(2), 110–135.
- [5] Rengganis, O., & Valianti, R. M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada PT . Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung PENDAHULUAN Lembaga perbankan merupakan salah satu sumber perekonomian negara . Dimana kegiatannya sebagai alat intermediasi yakni menghimpun dana dari masyar. *Jurnal Mediasi*, 2(2), 110–135..
- [6] S. Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 1st ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- [7] Houston, B. (2018). *DASAR DASAR MANAJEMEN KEUANGAN*. Salemba Empat..